



**PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN
KELAS IB**

2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN



Jalan Sutan Syahrir No.16, Pangkalan Bun 74111
Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179



www.pn-pangkalanbun.go.id



pangkalanbunpn@gmail.com



RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

**Jl. Sutan Syahrir No. 16 Pangkalan Bun 74111
Telpon (0532) 21014 Fax (0532) 21179**

2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah jam Pelaksanaan Pelayanan Posbakum	480 jam	24.000.000
		b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu	80%					
		c. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana	30%					
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	80%					
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	80%					
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%					
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu	90%			Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100 perkara	26.650.000
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%					
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%					
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	90%					
						Jumlah Perkara	2 perkara	900.000

3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%			peradilan umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%					
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	10%					
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Jumlah layanan dukungan manajemen peradilan	12 layanan	91.957.000
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%					
		c. Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan	85%			Jumlah layanan perkantoran	12 bulan layanan	3.851.852.000
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	45%					
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan peradilan berdasarkan parameter objektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	65%					
		b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian	70%					
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	65%					
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif	80%					

7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80%	Program Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah Pembangunan/ renovasi Gedung dan Bangunan	1 paket	50.000.000
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%			Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	31 unit	95.000.000
		c. Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja	90%			Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	17 unit	150.000.000
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	85%			Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	- unit	-

Pangkalan Bun, Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.

NIP. 19721128 199903 1 011

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu	80%
		c. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana	30%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	80%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	80%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu	90%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	90%
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	10%
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
		c. Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan	85%
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	45%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan peradilan berdasarkan parameter objektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	65%
		b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian	70%
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	65%
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif	80%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80%
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%
		c. Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja	90%
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	85%

Pangkalan Bun, 6 Oktober 2017

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



(Handwritten signature in blue ink)
A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.
NIP. 19721128 199903 1 011



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Nomor : W16-U3/109/KPN/SK/XII/2017**

***Tentang*
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
SISTEM AKUTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN (SAKIP) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**
- PERTAMA** : Anggota Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bertugas :
1. Menyusun reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
 2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 3. Menyusun Perjanjian Kerja Tahunan (PKT)
 4. Menyusun / mereviu Renstra
 5. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

Pada tanggal : 29 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



A.A.GD.AGUNG PARNATA, S.H.,CN
NIP.197211281999031011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pegawai yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun

Nomor : W16-U3/109/KPN/SK/XII/2017

Tanggal : 29 Desember 2017

No	Nama /NIP	Jabatan	Ditunjuk /diangkat Sebagai
1.	Iman Santoso, SH.,MH.	Hakim	Ketua Tim
2.	Wahdani, SH.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
3.	Husni Thamrin, ST.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariat
4.	Yudha Pradana P., A.Md.	Staf PTIP	Sekretaris
5.	Mantiko Sumanda M, SH.,M.Kn.	Hakim	Anggota
6.	Ucok Richon Manik, SH.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	Jurmani, SH.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	Hariyanto	Plt. Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	Deni Nurmaryah, SE.	Kasubag Umum & Keuangan	Anggota
10.	Muhammad Amrullah	Kasubag PTIP	Anggota
11.	Rosilawati, A.Md.	Plt. Kasubag Kepegawaian dan ORTALA	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



A.A.GD.AGUNG PARNATA
A.A.GD.AGUNG PARNATA, S.H.,CN
NIP. 19721128 199903 1 011

**NOTULEN RAPAT PEYUSUNAN SAKIP TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

- I. Pelaksanaan
 - Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
 - Hari/tanggal : Selasa, 2 Januari 2018
 - Waktu : 08.00 WIB
 - Agenda :
 1. Pembuatan laporan LKjIP Tahun 2017
 2. Reviu Dokumen IKU
 3. Reviu Renstra Tahun 2015-2019
 4. Revisi Dokumen RKT tahun 2017 dan 2018 serta Menyusun dokumen RKT 2019
 5. Revisi Dokumen PKT tahun 2017 dan 2018.
- II. Pemimpin Rapat

Dalam rapat Penyusunan SAKIP Tahun 2017 ini sebagai Pimpinan Rapat adalah Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- III. Susunan Acara
 - Pembukaan
 - Pembahasan Rapat (Isi Rapat)
 - Penutup
- IV. Peserta Rapat
 - Peserta rapat adalah : Sekretaris, Kasub / Plt. Kasub Bagian dan Staf
 - Jumlah peserta rapat 10 (sepuluh) orang
- V. Jalannya Rapat
 1. Pembukaan

Rapat dibuka pada pukul 08.00 WIB berisi Penyampaian Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Surat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor W16-U/1734/OT.01.2/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
 2. Pembahasan Rapat sebagai berikut :
 - A. **Pembuatan LKjIP Tahun 2017**

Hal-hal yang dibahas antara lain:

 - Masing-masing bagian terkait menyampaikan data dan perhitungan capaian Indikator Kinerja tiap-tiap sasaran.
 - Terdapat 6 Indikator kinerja capaiannya dibawah target dan ditelaah faktor penyebab dan sulosi yang akan diambil pada tahun 2018
 - Capaian Indikator kinerja dijadikan input dalam Reviu Renstra.
 - B. **Reviu Dokumen IKU**

Hal-hal yang dibahas antara lain:

 - Tujuan, Sasaran Utama dan Indikator Kinerja telah disesuaikan dengan Reviu IKU sebagaimana Surat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor W16-U/1272/OT.01/IX/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Tindak lanjut konsolidasi SAKIP dan Surat Sekretaris MARI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

C. Reviu Renstra Tahun 2015-2019

Hal-hal yang dibahas antara lain:

- Berdasarkan nilai capaian Indikator kinerja tahun 2017 dilakukan reviu renstra dan ditetapkan dengan SK Penetapan Reviu Renstra Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

D. Revisi Dokumen RKT tahun 2017 dan 2018 serta Menyusun dokumen RKT 2019

Hal-hal yang dibahas antara lain:

- Dokumen RKT 2017 dan 2018 serta RKT 2019 Tujuan, Sasaran Utama dan Indikator Kinerja telah disesuaikan dengan Reviu IKU sebagaimana Surat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor W16-U/1272/OT.01/IX/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Tindak lanjut konsolidasi SAKIP dan Surat Sekretaris MARI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
- Nilai Target yang ingin dicapai telah disesuaikan dengan Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

3. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 10.45 WIB

Mengetahui :
Pimpinan Rapat,



A.A.GD.AGUNG PARNATA, SH., CN.
NIP. 19721128 199903 1 011

Notulis,



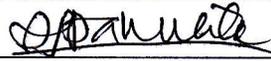
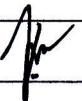
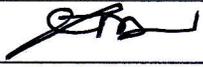
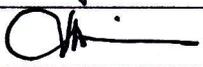
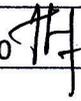
YUDHA PRANDANA P., A.Md
NIP. 19910328 201503 1 001

ABSEN RAPAT

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

TANGGAL: ~~SELASA~~, 2 JANUARI 2018 .

AGENDA : PENYUSUNAN SAKIP 2017

NO.	NAMA	TANDA TANGAN / PARAF	
1	AGUNG PARNATA	1.	
2	Iman Saifur		2. 
3		3.	
4	Agal Abanna		4. 
5	Yaniko S.M	5.	
6	Alusni HesaWAN		6. 
7	HR. Mank	7.	
8	Jusmari		8. 
9	Posilawan	9.	
10	Haryanto		10. 
11	Yudha Pradana Putra	11.	
12			12
13		13	
14			14
15		15	
16			16
17		17	
18			18

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN**



**A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH.,CN.
NIP. 19721128 199903 1 011**



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

Jl. Sutan Syahrir No 16 Pangkalan Bun. 74111

Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179

Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Pangkalan Bun, Desember

2017
Nomor : W16-U3/ /RPT/XII/2017
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Penyusunan
SAKIP tahun 2017

K E P A D A YTH.
Bapak/ Ibu / Saudara (i)

.....
.....

Di –
TEMPAT

Sehubungan dengan tugas pokok Tim Penyusun Laporan SAKIP Tahun 2017 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, maka dengan ini kami mohon kehadirannya dalam rapat tim yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2018
Pukul : 08.00 WIB
Agenda : 1. Pembuatan laporan LKjIP Tahun 2017
2. Reviu Dokumen IKU
3. Reviu Renstra Tahun 2015-2019
4. Revisi Dokumen RKT tahun 2017 dan 2018 serta Menyusun dokumen RKT 2019
5. Revisi Dokumen PKT tahun 2017 dan 2018.

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN**

**A.A.GD.AGUNG PARNATA, SH., CN.
NIP. 19721128 199903 1 011**